

MEMBANGKITKAN BISNIS UMKM MELALUI PENTA HELIX SEBAGAI EKONOMI PROGRESIF

Karina Utami Anastuti

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang
Corresponding Email: karinautamianastuti@unisma.ac.id

Rio Era Deka

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang
Email: rioeradeka@unisma.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengembangkan potensi UMKM terpadu berbasis wilayah, peningkatan kemampuan digital UMKM, replikasi kemitraan strategis UMK dan UMK, serta pengembangan ruang produksi bersama bagi sentra UMKM. Dengan tujuan ekonomi progresif berupaya untuk mempengaruhi pasar melalui kebijakan atau aturan main yang mampu meningkatkan kesejahteraan kaum miskin dan mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep Penta Helix merupakan evolusi dari konsep Triple Helix dengan mengintegrasikan peran akademisi, pengusaha, pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan kreatif dan pengetahuan. Melalui kerjasama Penta Helix, pemerintah daerah dapat memberikan tanggungjawab pemberdayaan komunitas atau masyarakat kepada perguruan tinggi sehingga sumberdaya yang dimiliki dapat dipergunakan dengan lebih optimal.

Kata Kunci: UMKM, Penta Helix, Ekonomi Progresif

Abstract

The purpose of this research is to identify and develop the potential of regional-based integrated MSMEs, increase digital capabilities of MSMEs, replicate MSEs and MSEs strategic partnerships, and develop joint production spaces for MSME centers. With the goal of a progressive economy trying to influence the market through policies or rules of the game that are able to increase the welfare of the poor and reduce income inequality and social welfare. The Penta Helix concept is an evolution of the Triple Helix concept by integrating the roles of academics, entrepreneurs, government and society in creative and knowledge activities. Through the Penta Helix collaboration, local governments can give community or community empowerment responsibilities to universities so that their resources can be used more optimally.

Keywords: SMEs, Penta Helix, Progressive Economy

PENDAHULUAN

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan bahwa tahun 2023 merupakan momentum kebangkitan bagi UMKM di Indonesia. Dari sekian banyak jumlah pelaku usaha, pelaku UMKM menjadi penopang terbesar bagi pendapatan perekonomian nasional.

Di tahun 2023 ini terdapat empat peluang bagi transformasi UMKM. Pertama yaitu populasi generasi muda mencapai 64% dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut 73% anak muda Indonesia berminat wirausaha. Hal ini harus didorong untuk menghadirkan momentum

entrepreneur muda yang produktif dan kompetitif. Banyak entrepreneur muda yang sudah memanfaatkan momentum ini.

Kemudian yang kedua adalah potensi ekonomi digital kita yang semakin tumbuh. Pada tahun 2021 nilai transaksi e-commerce mencapai Rp 395 triliun, jumlah ini diperkirakan semakin meningkat. Hal itu dikarenakan banyaknya e-commerce yang bermunculan sejak awal pandemic covid.

Berdasarkan data Google, Temasek, and Bain & Company nilai ekonomi digital diperkirakan akan mencapai US\$ 146 miliar atau Rp 2100 triliun di 2025. Selama pandemi Covid-19 transaksi UMKM di pasar online meningkat 26% tercatat 3,1 juta transaksi per hari serta kenaikan 35% pengiriman barang. Indonesia mendapatkan 21 juta konsumen digital baru sejak awal pandemi, dan uniknya 72% bukan berasal dari kota metropolitan ini sangat positif untuk pertumbuhan penetrasi di pasar digital.

Ketiga tahun 2021 ini plafon kur ditingkatkan menjadi Rp 373,17 triliun. Relaksasi kebijakan kur tetap dilanjutkan dengan pemberian subsidi bunga 3% selama 6 bulan. Di tahun 2024 pemerintah menargetkan porsi kredit perbankan untuk UMKM juga ditingkatkan menjadi 30%. Keempat yaitu keterlibatan Indonesia di berbagai forum internasional juga memberikan keleluasaan yang besar bagi pengembangan UMKM di tanah air.

UMKM akan menjadi salah satu bantalan pemulihan ekonomi 2023. Dampak dari pandemi Covid-19 98% UMKM mengalami permasalahan demand shock dan supply shock antara lain karena berkurangnya pesanan, kesulitan distribusi dan kesulitan memperoleh bahan baku. Target indikator UMKM di tahun 2023 yaitu kontribusi UMKM ke PDB 63%, rasio kredit UMKM ke total kredit perbankan sebesar 20,9%, dan rasio kewirausahaan nasional 3,75%. Strategi pemulihan UMKM 2023 yaitu subsidi bunga restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit UMKM, perluasan layanan pendampingan usaha, pelatihan ketahanan usaha, dan bantuan produktif usaha mikro.

Pemerintah juga menjalankan strategi peningkatan nilai tambah UMKM 2023 yaitu pengembangan potensi UMKM terpadu berbasis wilayah, peningkatan kemampuan digital UMKM, replikasi kemitraan strategis UMK dan UMK, serta pengembangan ruang produksi bersama bagi sentra UMKM. Tahun 2023 dilaksanakan major project pengelolaan terpadu UMKM dilaksanakan di 5 provinsi yaitu Aceh (Nilam), Jawa Tengah(Kayu), Kalimantan Timur (Biofarmaka), Sulawesi Utara (Kelapa) dan NTT (Sapi).

Pertumbuhan UMKM menjadi bantalan utama sektor perekonomian ini harus diikuti kebijakan dan strategi untuk meningkatkan bisnis UMKM. Maka dengan ini penulis mengkaji bagaimana kebijakan ekonomi progresif dalam ekonomi pasar yang adil (fair). Dengan tujuan ekonomi progresif berupaya untuk mempengaruhi pasar melalui kebijakan atau aturan main yang mampu meningkatkan kesejahteraan kaum miskin dan mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Progresif

Ekonomi progresif secara filosofis didefinisikan sebagai lawan dari ekonomi liberal, ekonomi *laissez-faire*, atau ekonomi kapitalis. Banyak organisasi atau lembaga yang mempromosikan ekonomi progresif dapat dikategorikan sebagai organisasi yang anti-kapitalis. Prinsip-prinsip dan kebijakan ekonomi progresif didasarkan atas pemikiran Keynes, Marxis, dan pemikiran sosial ekonomi atau paradigma sayap kiri (Mersch, 2013).

Pemikiran Keynes adalah bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan *output* potensial, yang menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada tingkat makro sehingga mengurangi pengangguran dan deflasi. Keynes menyimpulkan bahwa tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan *output* dan lapangan pekerjaan ke kondisi *full employment* (Hoppe, 2007) kecuali melalui intervensi pemerintah.

Mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, membangun sebuah yayasan untuk mengembangkan ekonomi progresif dengan landasan “memanusikan manusia pada ekonomi global” (*put a human face on the global economy*). Ia menegaskan bahwa ekonomi progresif mengembangkan pemikiran dan solusi kebijakan publik untuk perdagangan dan globalisasi, untuk mempromosikan secara luas pembagian kesempatan dan kesejahteraan, memperkuat perdamaian dan keamanan, membangun dan meningkatkan aturan hukum, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengurangi kemiskinan global (www.progressiveeconomy.org).

Ekonomi progresif dikatakan sebagai paradigma sayap kiri sehingga jelas bertentangan dengan sayap kanan, yang adalah ekonomi kapitalis yang menganut system pasar bebas. Ide dibalikinya adalah bahwa pasar bebas itu tidak adil (*unfair*), lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan besar (*corporations*), dan kaum yang mampu (*wealthy*). Oleh karena itu, ekonomi progresif mempromosikan system ekonomi pasar yang adil (*fair*) yang menghasilkan kekayaan terdistribusi secara normal pada seluruh masyarakat karena pada kenyataannya terjadi ketimpangan pendapatan yang sangat besar antara kaum kaya dan kaum miskin. Dengan demikian, ekonomi progresif berupaya untuk mempengaruhi pasar melalui kebijakan atau aturan main yang mampu meningkatkan kesejahteraan kaum miskin dan mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Banyak kebijakan dan aktor yang berperan dalam meningkatkan dan memperkecil ketimpangan kesejahteraan masyarakat, diantara adalah pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi. Oleh karena kesejahteraan masyarakat bersifat kompleks maka diperlukan adanya kerjasama antar berbagai pihak terkait. Kerjasama antara perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah dikenal dengan *Triple Helix ABG (Akademisi-Business-Government)*. Kebijakan ini tampaknya kurang menyentuh kehidupan masyarakat kecil karena perusahaan yang mampu bekerjasama adalah perusahaan-perusahaan besar, sementara lebih dari 90% usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang lebih berbasis pada masyarakat banyak. Oleh karena itu, pendekatannya perlu

bergeser menjadi *Penta Helix ABCGM (Akademisi-Business-Community-Government-Media)*.

Ekonomi Progresif sebagai Pembangunan yang Inklusif

Ekonomi progresif menjadi perdebatan akademis dan politis yang cukup panjang dan telah berlangsung lama. Masyarakat Uni Eropa bahkan membentuk beberapa institusi khusus yang mengkaji ekonomi progresif, seperti *Progressive Economy Forum*, *Progressive Economy Academic Project*, dan *Progressive Economy Parliamentary Alliance* (Mersch, 2013). Institusi-institusi ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan debat publik yang diarahkan untuk memberi kontribusi terhadap pemikiran dan tindakan untuk mewujudkan ekonomi progresif. Sesuai dengan prinsip Keynes bahwa kesejahteraan masyarakat bisa tercapai melalui campur tangan atau intervensi pemerintah.

Sebagai pandangan yang anti-kapitalis, maka ekonomi progresif mengutamakan kesejahteraan masyarakat banyak, tidak hanya pemiliki modal atau penguasa sumberdaya produktif. Jika peningkatan kesejahteraan masyarakat pada sekonomi pasar atau kapitalis bisa bersifat eksklusif pada kalangan masyarakat yang menguasai sumberdaya produktif, maka kesejahteraan pada ekonomi progresif bersifat inklusif untuk semua lapisan masyarakat.

Menurut Sen (2000), permasalahan inklusi sosial adalah suatu kondisi yang tidak menguntungkan dari seseorang atau kelompok social tertentu karena mereka terpinggirkan oleh orang atau kelompok lain atas berbagai peluang dan kesempatan yang tersedia. Dengan demikian apabila terjadi masalah inklusi sosial maka pada masyarakat bersangkutan terjadi pula kelas-kelas sosial sehingga membatasi mobilitas sosial secara vertikal.

Dalam teori kemiskinan, masalah inklusi sosial termasuk kesmiskinan struktural. Kemiskinan struktural memandang bahwa seseorang itu miskin karena hambatan-hambatan struktural yang secara sistemik telah membuat orang tersebut tidak memiliki kesamaan akses atau kesempatan untuk merubah kondisi kemiskinannya (Rejekiingsih, 2011).

Merujuk pada prinsip ekonomi progresif dan ekonomi pasar maka keberhasilan pembangunan yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi tidak menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum baik. Rauniyar dan Kanbur (2010) menegaskan bahwa perlu membedakan konsep pertumbuhan (*growth*) dan pembangunan (*development*). Pembangunan membawa pengaruh terhadap dimensi-dimensi kesejahteraan (*well being*) yang luas dan tidak hanya diukur dari pendapatan (*income*) semata. Jika dikaitkan dengan pembangunan inklusif maka pembangunan menekankan pada upaya mendorong pembangunan yang memperhatikan pemerataan pendistribusian kesejahteraan (*well being*) di dalam masyarakat.

Pemerintah Indonesia memandang ekonomi progresif sangat penting untuk diwujudkan maka pembangunan yang inklusif telah

ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai sasaran pembangunan nasional pada periode perencanaan pembangunan 2005 – 2025.

Kebijakan *Penta Helix* dalam ekonomi progresif

Tujuan pembangunan nasional ekonomi progresif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersifat inklusif. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya menjadi fokus dan subyek bukan obyek pembangunan. Namun pendekatan kepada masyarakat secara individu lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan pendekatan kelompok. Oleh karena itu, kelompok atau komunitas masyarakat perlu diikutsertakan dalam proses pembangunan menjadi *Penta Helix* seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar. Pendekatan *Penta Helix* sebagai kolaborasi

Komunitas yang dimaksud adalah kumpulan individu yang memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari [bahasa Latin](#) *communitas* yang berarti "kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak". (Wenger, 2002: 4). Dilihat dari minat, komunitas merupakan sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras, maupun berdasarkan kelainan seksual. Komunitas umumnya bersifat informal dan tidak memiliki aturan tertulis. Oleh karena, seringkali tidak tersentuh program-program pemerintah yang bersifat formal.

Konsep *Penta Helix* merupakan evolusi dari konsep *Triple Helix* dengan mengintegrasikan peran akademisi, pengusaha, pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan kreatif dan pengetahuan. Dalam penelitiannya, Mulyana (2014) menyatakan bahwa konsep *Penta Helix* merupakan solusi bagi pengembangan kreativitas, inovasi dan teknologi UMKM. Pembahasan kinerja kreativitas dan inovasi UMKM dengan dukungan *Penta Helix* masih belum jelas dan sangat terbatas. Saat ini, pemerintah

Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM secara lebih inovatif, kreatif dan positif agar dapat beroperasi dalam ekonomi berbasis inovasi. Bekerja sama dengan para akademisi, pengusaha, dan komunitas pendukung yang tergabung dalam *Penta Helix* untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Konsep pentahelix yang menggabungkan peran akademisi, badan usaha (bisnis), komunitas, pemerintah, dan media bertujuan untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi bertransformasi menjadi produk maupun jasa yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat UMKM. Dengan menemukan pola kemitraan melibatkan berbagai pihak dan peran, tujuan tersebut juga mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan, dan perbaikan lingkungan hidup. Ringkasnya, konsep pentahelix adalah salah satu cara dalam mengatasi masalah UMKM dan mengembangkan program dengan melibatkan lintas sektor untuk saling berkolaborasi. Yang menjadi titik fokus *Penta Helix* adalah kolaborasi antara pemerintah bersama para pemangku kepentingan hingga masyarakat UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dalam hal ini peran perguruan tinggi dapat dioptimalkan melalui tridharma perguruan tinggi. Melalui kerjasama *Penta Helix*, pemerintah daerah dapat memberikan tanggungjawab pemberdayaan komunitas atau masyarakat kepada perguruan tinggi sehingga sumberdaya yang dimiliki dapat dipergunakan dengan lebih optimal. konsep kolaborasi antara akademisi, industri, pemerintah dan masyarakat, dan bahwa setiap peran helix sama pentingnya untuk mendorong inovasi dan kreativitas bagi UMKM.

SARAN

Penelitian selanjutnya diharapkan lebih banyak penelitian dilakukan tentang penta helix. Di masyarakat titik fokus penta helix dapat dikembangkan pada kolaborasi dengan media massa. Dimana media massa sekarang perkembangannya secara cepat sekali. Perkembangan media massa begitu cepat dikarenakan perkembangan teknologi yang cepat. Selanjutnya penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Mengukur hubungan antara variabel penta helix dengan kinerja perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Faisal. 2013. *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Ahmaddien, Iskandar., dan Syarkani, Yofy. 2019. *Statistika Terapan dengan Sistem SPSS*. Bandung: Institut Teknologi Bandung

- Andriatno, dkk. 2019. *Manajemen Bank*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media
- Astarina, dkk. 2015. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Deka, R.E., Nurhajati, N. and Rachma, N., 2020. Pengaruh brand association dan brand awareness terhadap brand loyalty melalui brand trust pada start up fintech OVO. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU)*, 4(1), pp.96-107.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisa Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Financial Accounting Standards Board (FASB). 1980. "Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.2: Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan"
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Harahap, Sofyan Syafri. 2018. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Cetakan ke-14. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- katan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Penyajian Laporan Keuangan*
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Penyajian Laporan Keuangan*, edisi revisi (2015)
- Kasiram, Mohammad. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama, Cetakan Keenam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2014. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Maith, Hendry Andres. 2013. *Analisa Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna. Tbk*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado. [diakses pada 20 November 2020]
- Munawir, S. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat, Cetakan ke-17 Yogyakarta: Liberty, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*, Cetakan ke-11. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurhajati, N., Rachma, N., Deka, R.E. and Azwar, E., 2018. Inovasi disruptif: Tantangan dan peluang bagi UKM. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 1(2), pp.214-226.
- Santoso, Singgih. 2014. *Statistik Multivariat*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sartono, Agus. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi keempat. Yogyakarta: BPFE
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004
- Syamsudin, Lukman. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers

Van Horne, James C., dan Wachowicz, Jr. John M. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Edisi ketigabelas. Jakarta: Salemba Empat

Website

Idris, Muhammad. 2020. Persaingan Antar-bank BUMN yang Jadi Sorotan Erick

Tohir..<https://money.kompas.com/read/2020/07/04/123955726/persaingan-antar-bank-bumn-yang-jadi-sorotan-erick-thohir?page=all> [diakses pada 2 Januari 2021]

OJK. <https://www.ojk.go.id/> [diakses pada 13 November 2020]

<https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/administrasi/apa-itu-net-interest-margin/>(diakses tanggal 18 Oktober 2022)

<https://www.kajianpustaka.com/2020/12/loan-to-deposit-ratio-LDR.html>(diakses tanggal 18 Oktober 2022)

<https://accurate.id/ekonomi-keuangan/capital-adequacy-ratio/>(diakses tanggal 18 Oktober 2022)

<https://pintu.co.id/blog/pengertian-dan-cara-menghitung-car> (diakses tanggal 18 Oktober 2022)

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18681/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-623dnpn-tahun-2004/document?utm_medium=pusatdata (diakses tanggal 18 Oktober 2022)